

ALTERNATIF PENGELOLA WISATA PANTAI HALASSY NEGERI MORELLA KABUPATEN MALUKU TENGAH PADA FASE PRA DAN PASCA-KRISIS COVID-19

THE ALTERNATIVE OF HALASSY BEACH TOURISM MANAGEMENT AT MORELLA VILLAGE, CENTRAL MALUKU REGENCY IN THE PRE AND POST - CRISIS PHASE OF COVID-19

**Eygnor Gerald Talakua, Renoldy Lamberthy Papilaya, Wellem Talakua,
dan Elia Serravallo Lewerissa**

Program Studi Agrobisnis Perikanan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura

^{*)}Penulis korespondensi: eygnertalakua@gmail.com

Diterima 14 Juni 2021, disetujui 18 Juni 2021

ABSTRAK

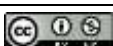
Perlu keterlibatan pihak terkait dalam penentuan alternatif yang tepat untuk mengelola wisata Pantai Halassy, Negeri Morella, Kabupaten Maluku Tengah. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengelola dan menentukan alternatif pengelola wisata Pantai Halassy yang tepat pada fase pra dan pasca-krisis covid-19. Melalui metode *purposive sampling* diperoleh 20 sampel sebagai responden dari para ahli atau pemangku kepentingan dibidang pariwisata serta ekonomi sumberdaya perikanan dan kelautan. Pengumpulan data primer dilakukan wawancara menggunakan kuesioner dalam bentuk google form. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi umum wilayah kajian, karakteristik responden, serta peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Metode kuantitatif yang digunakan yaitu *analytical hierarchy process* (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada fase pra krisis covid-19 pemerintah dapat membangun kualitas daerah wisata yang berwawasan lingkungan dan budaya; masyarakat sebagai pengelola mampu meningkatkan akses informasi bagi wisatawan; dan swasta memberikan kontribusi manfaat ekonomi dan sosial untuk kapasitas pengelolaan. Pada fase pasca pemerintah perlu melihat potensi wisata yang dapat dikembangkan; masyarakat dapat menerapkan konsep 4A; dan swasta lebih menciptakan ide-ide menarik untuk mendatangkan wisatawan. Alternatif pengelola wisata Pantai Halassy yang tepat pada fase pra dan pasca-krisis covid-19 adalah kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan swasta, dalam konsep *triple helix*.

Kata kunci: pengelola, wisata, pantai, Morella, covid-19.

ABSTRACT

The involvement of related parties is needed in determining the right alternative to manage Halassy Beach Tourism, Morella Village, Central Maluku Regency. The purpose of this study was to determine the role of the government, private sector, and community in managing and determining the appropriate alternative managers in the pre and post crisis phases of covid-19. Through the purposive sampling method, 20 respondents were obtained from experts or stakeholders in the field of tourism and the economics of fisheries and marine resources. Primary data collection was conducted by interview using a google form questionnaire. Descriptive method is used to describe the general condition of the study area, the characteristics of the respondents, as well as the role of the government, private sector and community. Data analysis used analytical hierarchy process (AHP). The results show that in the pre covid-19 crisis phase, the government can build tourist areas that are environmentally and culturally aware; the community as managers are able to improve the information access for tourists; and the private sector contributes economic and social benefits to management capacity. In the post covid-19 crisis, the government needs to pay attention to tourism potential that can be developed; the community can apply the 4A concept; and the private sector can create more interesting ideas to bring in tourists. The right alternative for Halassy Beach Tourism management in the pre and post-covid-19 crisis phases is collaboration between the community, government and private sector, in the triple helix concept.

Keywords: manager, tourism, beach, Morella, covid-19.



Cara sitasi: Talakua, G., E., Papilaya, L., R., Talakua, W., Lewerissa, S., E., 2021. Alternatif Pengelola Wisata Pantai Halassy Negeri Morella Kabupaten Maluku Tengah Pada Fase Pra Dan Pasca-Krisis Covid-19. PAPALELE: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, 5(1), 47-58, DOI: <https://doi.org/10.30598/papalele.2021.5.1.47/>

PENDAHULUAN

Bencana pandemik covid-19 dirasakan berpengaruh sangat luas dan masif terhadap kondisi perekonomian, bahkan boleh dikatakan nyaris telah mengubah seluruh tatanan ekonomi dan bisnis di berbagai sektor (Yusup *dkk*, 2020). Tahap atau fase krisis covid-19 dapat dibagi atas tiga, yakni fase pra-krisis covid-19 dimulai dari akhir bulan Januari hingga awal bulan Maret tahun 2020, fase awal krisis yaitu tanggal 2 hingga 14 Maret 2020, dan fase krisis setelah tanggal 14 Maret 2020 (Wijayanto *dalam* Engkus *dkk* (2020).

Pada fase pra-krisis covid-19 sektor ekonomi di Indonesia yang paling terdampak adalah sektor pariwisata. Merujuk pada penjelasan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada bulan Januari tahun 2020 bahwa sektor ekonomi yang paling terdampak wabah covid-19 adalah sektor pariwisata (Kurniati, 2020). Sektor pariwisata di Provinsi Maluku juga mengalami hal yang sama. Wabah covid-19 berdampak pada dirumahnya pekerja di empat sektor, sektor pertama yang disebutkan adalah sektor pariwisata (Beritabeta, 2020). Selain itu kebijakan penutupan seluruh lokasi wisata di Provinsi Maluku oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Maluku pada tanggal 22 Maret 2020 sangatlah penting untuk dilakukan (Tribunnews, 2020). Salah satu lokasi wisata di Provinsi Maluku yang mengalami penutupan (tanpa terkecuali) adalah wisata Pantai Halassy Negeri Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Pada fase pra-krisis covid-19 dimulai dari akhir bulan Januari hingga awal bulan Maret tahun 2020, wisata Pantai Halassy Negeri Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah masih dibuka untuk umum dan dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara. Hasil wawancara awal dengan pengelola wisata menunjukkan bahwa rata-rata

jumlah kunjungan wisatawan per hari dari awal bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2020 (kuartal pertama tahun 2020) sebanyak 67 orang. Jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah kunjungan per hari pada bulan Januari hingga Maret tahun 2019 (kuartal pertama tahun 2019) sebanyak 259 orang, maka jumlah kunjungan wisatawan pada fase pra-krisis covid-19 atau kuartal pertama tahun 2020 mengalami penurunan.

Ramadhan (2020) *dalam* (Yusup *dkk*, 2020) mengemukakan bahwa, Covid-19 tampaknya telah merubah perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis. Perubahan pekerjaan hingga pendapatan masyarakat akan berdampak pada penurunan pendapatan (biaya) yang akan dikeluarkan untuk rekreasi (mengunjungi lokasi wisata) atau penurunan biaya konsumsi layanan jasa lingkungan. Rentetan dampak ini akan menurunkan jumlah kunjungan wisata hingga bermuara pada penurunan pendapatan usaha wisata dan pendapatan asli daerah.

Untuk itu usaha wisata Pantai Halassy Negeri Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan usaha pada fase pra dan pasca-krisis covid-19 bukan hal yang mudah, mengingat usaha ini dikelola secara mandiri oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan.

Dampak ekonomi harus berdampak positif terhadap masyarakat, dengan asumsi konservasi tetap terlaksana dengan baik dan ancaman terhadap konservasi menurun atau berkurang. Artinya, pengelolaan wisata Pantai Halassy Negeri Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah harus memperhatikan minimal 3 aspek penting yakni biaya pengelolaan, manfaat ekonomi bagi masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Pada prinsipnya, pengembangan pariwisata harus mengacu pada pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*).



Terlihat bahwa terdapat 3 unsur penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yakni masyarakat, pemerintah, dan swasta. Lebih jauh, Sugihamretha (2020), menyimpulkan bahwa kerja sama yang erat di antara semua aktor terkait merupakan kunci melawan keruntuhan ekonomi, termasuk di sektor pariwisata.

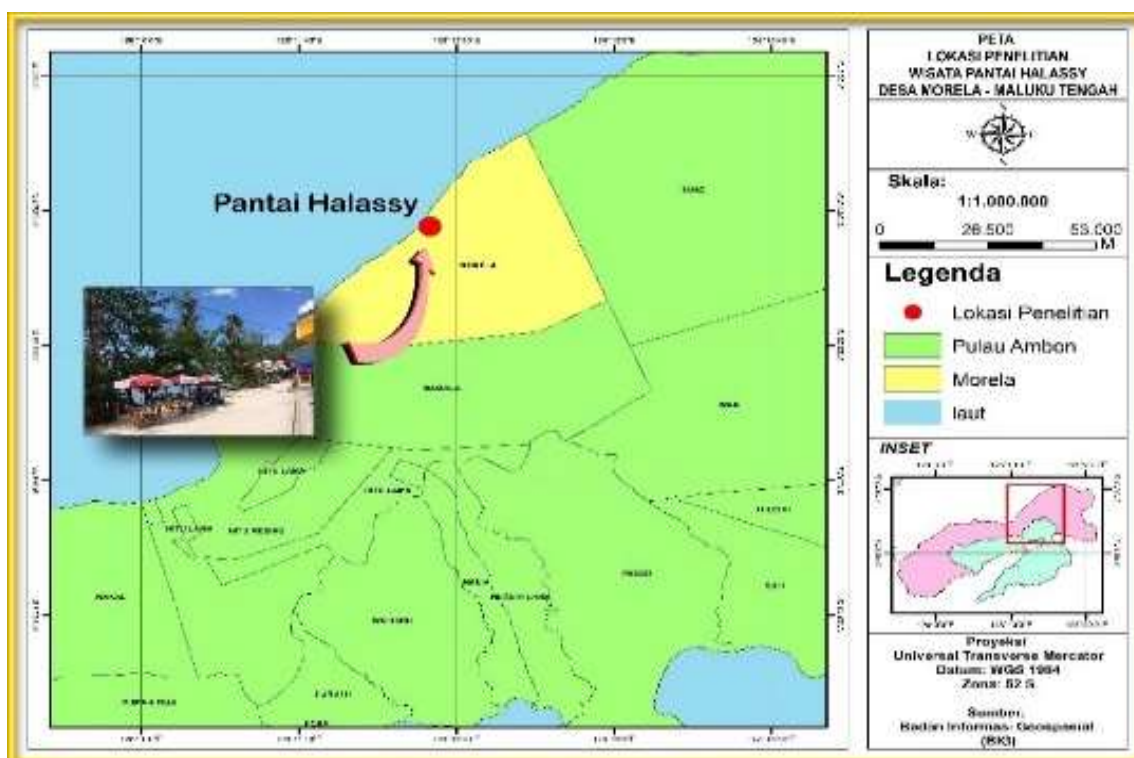
Dengan demikian terdapat pilihan-pilihan, pihak mana yang tepat mengelola wisata Pantai Halassy pada fase pra dan pasca-krisis covid-19 yakni tetap pada kondisi sekarang, masyarakat, atau perlu peran pemerintah, swasta, ataupun kolaborasi

diantaranya guna menjamin keberlanjutan wisata tersebut. Untuk itu judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Alternatif Pengelola Wisata Pantai Halassy Negeri Morella Kabupaten Maluku Tengah Pada Fase Pra dan Pasca-krisis Covid-19”.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah Wisata Pantai Halassy, Negeri Morella, Kecamatan Leihiitu, Kabupaten Maluku Tengah.



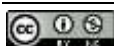
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan dalam bentuk google form pada lampiran 1). Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur terhadap laporan penelitian dan artikel ilmiah yang dipublikasi oleh instansi resmi maupun jurnal ilmiah di internet.

Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para ahli atau pemangku kepentingan di bidang pariwisata dan ekonomi sumberdaya perikanan dan kelautan yang sifatnya terbatas dan ditentukan. Untuk itu metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017), *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan metode tersebut diperoleh 20 sampel sebagai responden yang terdiri atas: birokrasi pemerintah 4 orang, akademisi 14



orang, praktisi 1 orang dan pengelola wisata 1 orang.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi umum wilayah kajian, karakteristik responden, serta peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Pantai Halassy. Adapun metode kuantitatif dijabarkan sebagai berikut: Rumusan alternative pengelolaan wisata Pantai Halassy pada fase pra dan pasca-krisis covid-19 menggunakan *analytical hierarchy process* (AHP). Permadi (1992) dalam Falatehan (2016), mengemukakan 3 prinsip dalam memecahkan persoalan dengan menggunakan analisis logis eksplisit, yakni:

- a. Menyusun hirarki
- b. Menentukan prioritas
- c. Konsistensi logis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dimaksud adalah karakteristik pendidikan, kompetensi, dan unit kerja. Karakteristik responden diuraikan sebagai berikut:

1. Jenjang pendidikan sebagian responden berada pada jenjang S2 dan S3.
2. Bidang kompetensi sebagian responden adalah sosial Ekonomi Perikanan.
3. Unit kerja sebagian besar responden pada perguruan tinggi (pada unit kerja Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura).

Pengelolaan Wisata Pantai Halassy

Wisata Pantai Halassy resmi dibuka pada awal bulan Januari tahun 2018, hingga saat ini wisata Pantai Halassy adalah usaha perseorangan yang melibatkan anggota keluarga dan masyarakat. Pengelolaan wisata Pantai Halassy mengacu pada definisi manajemen pariwisata oleh Zaeniru (2012) yakni, umumnya dapat diketahui bahwa manajemen itu meliputi unsur-unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Uraian tentang pengelolaan wisata Pantai Halassy adalah:

1. Perencanaan
Pengelola belum pernah memiliki perencanaan hingga program kerja yang jelas dan teradministrasikan dengan baik, perencanaan hanya lisan. Pengelola juga belum menyediakan sarana dan prasarana yang memadai berupa jumlah alat *snorkeling* yang terbatas, dan ketersediaan konsumsi yang tidak lengkap (hanya makanan ringan dan air mineral) pada wisata pantai Halassy di Negeri Morella.
2. Pengorganisasian
Penyusunan organisasi dilakukan dengan cara penunjukan, dalam perjalanannya sebagian besar personil yang telah ditunjuk tidak dapat aktif karena pekerjaan, dengan demikian hanya pengelola (ketua) yang masih aktif hingga sekarang.
3. Pelaksanaan
Pelaksanaan rencana (kerja rutin dan insidental) yang disampaikan lisan oleh pengelola dilakukan oleh anggota keluarga dan masyarakat.
4. Pelaporan
Pelaporan dilakukan oleh masing-masing individu (anggota keluarga/masyarakat) pelaksana kerja rutin/insidental langsung kepada pengelola.
5. Evaluasi
Evaluasi kerja rutin dan insidental dilakukan oleh pengelola tanpa catatan administrasi yang baik.

Uraian pengelolaan tersebut menggambarkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan atau manajemen wisata Pantai Halassy masih sangat sederhana dan membutuhkan peningkatan sistem manajemen. Kondisi pengelolaan ini masih menggambarkan bentuk pengelolaan wisata yang umumnya ada di Kabupaten Maluku Tengah, dimana menurut Amin (2019) pengelolaan obyek wisata di Pantai Hunimua, Kabupaten Maluku Tengah dirasakan masih belum optimal karena atraksi (daya tarik) wisatanya belum didukung dengan fasilitas wisata yang memadai seperti petugas keamanan, penginapan, rumah makan, toko souvenir, wahana bermain, dan fasilitas penting lainnya. Bahkan beberapa fasilitas yang sudah ada sebelumnya mengalami rusak berat. Sehingga terkesan pengelolaan obyek



wisata ini seperti hanya mengejar keuntungan (*profit oriented*) tanpa memperhatikan keberlanjutan pengembangannya.

Peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Mengelola Wisata Pantai Halassy

Peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengelola wisata Pantai Halassy pada fase pra-krisis covid-19 dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pemerintah, swasta dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam mengelola wisata Pantai Halassy;
2. Masyarakat sebagai pengelola wisata Pantai Halassy harus menggunakan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat (*community-based management*);
3. Masyarakat sebagai pengelola dan pemerintah membangun kualitas daerah wisata yang berwawasan lingkungan, budaya, dan masyarakat;
4. Masyarakat sebagai pengelola meningkatkan akses informasi bagi wisatawan;
5. Masyarakat sebagai pengelola memelihara fasilitas bangunan beton diatas air;
6. Penguatan kapasitas pengelolaan melalui *corporate social responsibility* (CSR) dan investasi oleh swasta;
7. Masyarakat sebagai pengelola, pemerintah dan dibantu pihak swasta membuat program promosi;
8. Masyarakat sebagai membuat aturan pembuangan sampah;
9. Masyarakat sebagai pengelola, pemerintah dan dibantu pihak swasta menyusun 51ating511 kesehatan sesuai aturan yang berlaku di lokasi wisata; dan
10. Masyarakat sebagai pengelola, pemerintah dan dibantu pihak swasta mengfungsikan peran wisata untuk mengatasi kejenuhan masyarakat.

Pada fase pasca-krisis covid-19 peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengelola wisata Pantai Halassy dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan dan lebih berperan penting, bukan hanya sebagai *controller*, namun mampu

melihat potensi wisata agar dapat dikembangkan setelah pandemi.

2. Pemerintah harus menghidupkan kembali suatu destinasi wisata dengan menerapkan protokol kesehatan, mensosialisasikan dan menerapkan program *clean, health, dan safety*, serta membuat ide-ide baru untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
3. Saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat/pengelola, maupun juga swasta dalam menciptakan ide-ide yang menarik untuk mendatangkan wisatawan;
4. Masyarakat sebagai pengelola adalah tetap menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan wisata, dan tetap menerapkan protokol kesehatan saat bekerja;
5. Masyarakat sebagai pengelola menerapkan konsep 4A, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM);
6. Masyarakat sebagai pengelola mengembangkan produk-produk khas daerah; dan
7. Masyarakat sebagai pengelola tetap mengacu pada konsep awal, pengelolaan berbasis masyarakat (*community-based tourism*), namun lebih memperhatikan penerapan prinsip-prinsip *sustainable tourism*.

Secara umum responden mengharapkan adanya peran yang sama (kerja sama) antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola wisata Pantai Halassy baik pada fase pra-krisis ataupun fase pasca-krisis covid-19. Namun secara khusus jika dicermati, pada fase pra-krisis covid-19 responden masih mengharapkan fungsi wisata Pantai Halassy berjalan seperti biasanya (kondisi normal). Hal ini ditunjukkan dengan harapan responden kepada masyarakat sebagai pengelola wisata Pantai Halassy untuk tetap memperbaiki dan meningkatkan segi pelayanan (sisi teknis) dan pengelolaan yang masih kurang pada wisata Pantai Halassy untuk menghadapi fase krisis covid-19. Misalnya, harapan responden agar menyusun protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku di lokasi wisata. Untuk fase pasca-krisis covid-19, responden lebih mengharapkan pada peran pemerintah, dimana



adanya harapan pengembangan wisata Pantai Halassy tanpa meninggalkan konsep dasar pembangunan wisata Pantai Halassy dan penerapan protokol kesehatan.

Harapan adanya peran yang sama atau kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola wisata Pantai Halassy sejalan dengan aturan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dalam UU tersebut peran pemerintah, swasta dan masyarakat telah terlihat dalam defenisi kepariwisataan, yakni: “keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha”. Kata “interaksi” dalam defenisi tersebut secara luas dapat diartikan adanya hubungan atau peran yang sama atau kerja sama. Peran atau kerja sama secara detail telah diatur dalam UU tersebut pada BAB VII yang mengatur tentang hak, kewajiban dan larangan tiap orang, tiap wisatawan, masyarakat, pemerintah/pemerintah daerah, maupun pengusaha/swasta dalam berinteraksi.

Alternatif Pengelola Wisata Pantai Halassy

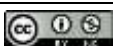
Seperti yang diuraikan di atas bahwa, pengelola wisata Pantai Halassy saat ini adalah usaha perorangan, yang melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar. Bentuk pengelola ini memiliki kelemahan dan keterbatasan pada fase pra dan pasca-krisis covid-19. Hal ini memunculkan pemikiran tentang perlu adanya alternatif pengelola wisata Pantai Halassy. Terdapat 3 kriteria pengelolaan yakni: biaya pengelolaan, kelestarian lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat, dalam menentukan alternatif pengelola wisata Pantai Halassy. Alternatif pengelola tersebut adalah Masyarakat, Pemerintah, Swasta, dan Kolaboratif (kerja sama Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta). Hasil *analytical hierarchy process* dengan program *expert choice* menunjukkan bahwa:

1. Kriteria Pengelolaan Wisata Pantai Halassy

Kriteria merupakan salah satu penilaian yang dijadikan pertimbangan dalam membentuk hierarki penentu analisis alternatif. Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai kriteria tertinggi pada fase pra-krisis covid-19 adalah kelestarian lingkungan sebesar 0,513 dengan nilai *inconsistency* yaitu 0,00327. Nilai tertinggi pada fase pasca-krisis covid-19 adalah manfaat ekonomi bagi masyarakat sebesar 0,508 dengan nilai *inconsistency* yaitu 0,00006. Selain pada Tabel 1, terlihat dengan jelas juga pada Gambar 2, bahwa persentase tertinggi adalah kelestarian lingkungan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menurut responden pada fase pra-krisis covid-19 kriteria kelestarian lingkungan menjadi prioritas dalam pengelolaan wisata Pantai Halassy, dikarenakan kelestarian lingkungan merupakan kriteria yang sangat menentukan keberlanjutan wisata, terutama wisata pantai. Meskipun saat fase pra-krisis covid-19 telah terjadi penutupan akses-akses pada wisata Pantai Halassy, namun pantai menjadi salah satu jenis wisata yang direkomendasikan oleh pemerintah pada masa *new normal* sehingga mutu lingkungan yang menjadi daya tarik wisata Pantai Halassy harus terpelihara. Menurut Solemede, *dkk* (2020), di masa pandemi ini tren pariwisata yang paling digemari yaitu tren wisata yang bukan padat atau kawasan wisata alam, seperti kawasan wisata bahari, wisata konservasi, wisata petualangan, taman nasional dan taman wisata alam lainnya.

Pada fase pasca-krisis covid-19 kriteria manfaat ekonomi bagi masyarakat menurut responden menjadi prioritas dalam pengelolaan wisata Pantai Halassy. Karena dengan memprioritaskan manfaat ekonomi bagi masyarakat, dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat. Apalagi dalam keadaan pasca-krisis covid-19, para pengelola wisata Pantai Halassy harus melihat peluang yang menjadi kekuatan untuk pengembangan wisata Pantai Halassy sehingga masyarakat



turut merasakan manfaat keberadaan wisata Pantai Hallassy.

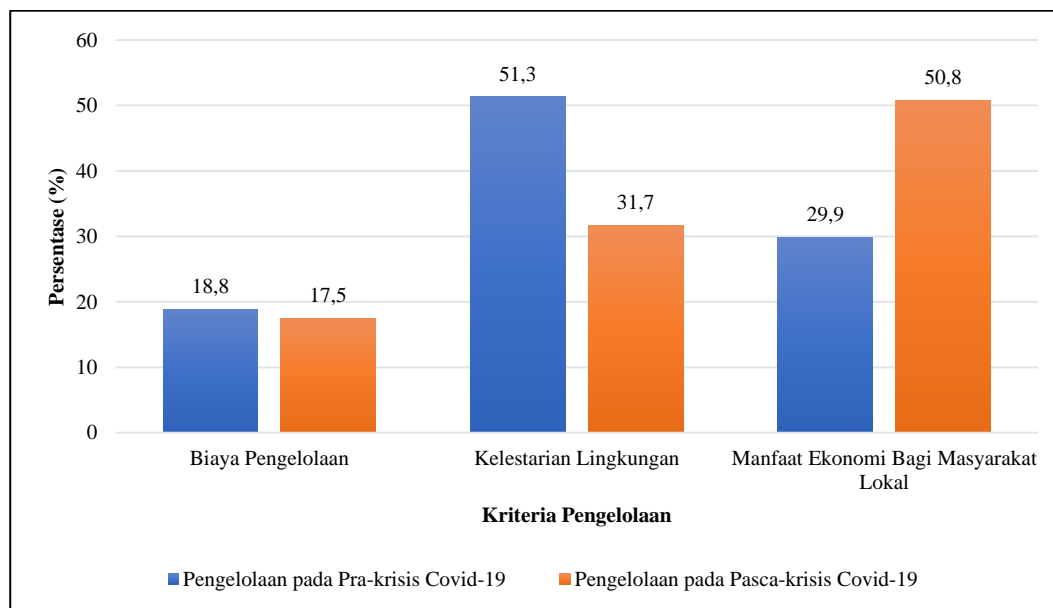
Dengan demikian pada fase pra dan pasca-krisis covid-19, kriteria yang menjadi prioritas pengelolaan wisata Pantai Halassy adalah kelestarian lingkungan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kedua prioritas ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh

pengelola wisata Pantai Halassy. Hasil analisis ini tidak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Muryani (2013) pada kondisi normal, dimana kriteria kelestarian lingkungan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat juga menjadi prioritas penting selain biaya pengelolaan dalam mengelola Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

Tabel 1. Kriteria Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Halassy

No.	Kriteria	Nilai	
		Pra-Krisis Covid-19 (<i>Inconsistency</i> 0,00327)	Pasca-Krisis Covid-19 (<i>Inconsistency</i> 0,00006)
1.	Biaya Pengelolaan	0,188	0,175
2.	Kelestarian Lingkungan	0,513*	0,317
3.	Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat	0,299	0,508*
Jumlah		1,000	1,000

Keterangan: * = kriteria tertinggi dan menjadi prioritas
Sumber: data primer diolah, 2020



Gambar 2. Persentase Kriteria Pengelolaan Wisata Pantai Halassy

Sumber: Data primer diolah, 2020.

2. Alternatif Pengelola Berdasarkan Kriteria Biaya Pengelolaan

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai tertinggi pada fase pra-krisis covid-19 adalah alternatif pengelolaan kolaboratif sebesar 0,503 dengan nilai *inconsistency* yaitu 0,02. Nilai tertinggi pada fase pasca-

krisis covid-19 adalah alternatif pengelolaan kolaboratif sebesar 0,610 dengan nilai *inconsistency* yaitu 0,00132.

Nilai dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa bentuk pengelola kolaboratif merupakan alternatif yang diprioritaskan atau prioritas pertama baik pada fase pra

ataupun pasca-krisis covid-19 dalam mengelola biaya yang ditanggung/dikeluarkan dalam usaha wisata Pantai Halassy. Untuk mengelola biaya pada fase pra-krisis covid-19, prioritas kedua adalah pengelolaan oleh swasta (nilai = 0,234), prioritas ketiga adalah pengelolaan oleh pemerintah (nilai = 0,134), dan prioritas terakhir atau keempat adalah pengelolaan oleh masyarakat (nilai = 0,129). Sedangkan untuk mengelola biaya pada fase pasca-krisis covid-19, prioritas kedua adalah pengelolaan oleh masyarakat (nilai = 0,149), prioritas ketiga adalah pengelolaan oleh pemerintah (nilai =

0,131), dan prioritas terakhir atau keempat adalah pengelolaan oleh swasta (nilai = 0,109). Angka-angka ini menunjukkan bahwa pada fase pra-krisis covid-19, responden menginginkan adanya pengelolaan kolaboratif, jika bentuk pengelolaan ini tidak tercapai maka pengelolaan perlu dilakukan oleh swasta, kemudian pemerintah dan terakhir adalah masyarakat. Sedangkan pada fase pasca-krisis covid-19 jika pengelolaan kolaboratif tidak dimungkinkan maka pengelolaan perlu dilakukan oleh masyarakat, kemudian pemerintah, dan terakhir adalah swasta.

Tabel 2. Alternatif Pengelola Berdasarkan Kriteria Biaya Pengelolaan

No.	Alternatif Pengelola	Nilai	
		Pra-Krisis Covid-19 (<i>Inconsistency</i> 0,02)	Pasca-Krisis Covid-19 (<i>Inconsistency</i> 0,00132)
1.	Pengelolaan Oleh Masyarakat	0,129	0,149
2.	Pengelolaan Oleh Pemerintah	0,134	0,131
3.	Pengelolaan Oleh Swasta	0,234	0,109
4.	Pengelolaan Kolaboratif	0,503*	0,610*
Jumlah		1,000	1,000

Keterangan: * = kriteria tertinggi dan menjadi prioritas
Sumber: data primer diolah, 2020

3. Alternatif Pengelola Berdasarkan Kriteria Kelestarian Lingkungan

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai tertinggi pada fase pra-krisis covid-19 adalah alternatif pengelolaan kolaboratif sebesar 0,600 dengan nilai *inconsistency* yaitu 0,01. Nilai tertinggi pada fase pasca-krisis covid-19 adalah alternatif

pengelolaan kolaboratif sebesar 0,622 dengan nilai *inconsistency* yaitu 0,01. Nilai ini mengartikan bahwa bentuk pengelola kolaboratif juga merupakan alternatif yang diprioritaskan baik pada fase pra ataupun pasca-krisis covid-19 dalam mengelola kelestarian lingkungan pada wisata Pantai Halassy.

Tabel 3. Alternatif Pengelola Berdasarkan Kriteria Kelestarian Lingkungan

No.	Alternatif Pengelola	Nilai	
		Pra-Krisis Covid-19 (<i>Inconsistency</i> 0,01)	Pasca-Krisis Covid-19 (<i>Inconsistency</i> 0,01)
1.	Pengelolaan Oleh Masyarakat	0,190	0,150
2.	Pengelolaan Oleh Pemerintah	0,126	0,121
3.	Pengelolaan Oleh Swasta	0,084	0,107
4.	Pengelolaan Kolaboratif	0,600*	0,622*
Jumlah		1,000	1,000

Keterangan: * = kriteria tertinggi dan menjadi prioritas



Sumber: data primer diolah, 2020

Nilai dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa bentuk pengelola kolaboratif merupakan alternatif yang diprioritaskan atau prioritas pertama baik pada fase pra ataupun pasca-krisis covid-19 dalam mengelola kelestarian lingkungan pada usaha wisata Pantai Halassy. Untuk mengelola/menata kelestarian pada fase pra-krisis covid-19, prioritas kedua adalah pengelolaan oleh masyarakat (nilai = 0,190), prioritas ketiga adalah pengelolaan oleh pemerintah (nilai = 0,126), dan prioritas terakhir atau keempat adalah pengelolaan oleh swasta (nilai = 0,084). Sedangkan untuk kelestarian lingkungan pada fase pasca-krisis covid-19, prioritas kedua adalah pengelolaan oleh masyarakat (nilai = 0,150), prioritas ketiga adalah pengelolaan oleh pemerintah (nilai

= 0,121), dan prioritas terakhir atau keempat adalah pengelolaan oleh swasta (nilai = 0,107).

4. Alternatif Pengelola Berdasarkan Kriteria Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai tertinggi pada fase pra-krisis covid-19 adalah alternatif pengelolaan kolaboratif sebesar 0,613 dengan nilai *inconsistency* yaitu 0,00908. Nilai tertinggi pada fase pasca-krisis covid-19 adalah alternatif pengelolaan kolaboratif sebesar 0,554 dengan nilai *inconsistency* yaitu 0,00471. Nilai ini mengartikan bahwa bentuk pengelola kolaboratif juga merupakan alternatif yang diprioritaskan baik pada fase pra ataupun pasca-krisis covid-19 dalam mengelola manfaat ekonomi wisata Pantai Halassy bagi masyarakat.

Tabel 4. Alternatif Pengelola Berdasarkan Kriteria Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat

No.	Alternatif Pengelola	Nilai	
		Pra-Krisis Covid-19 (<i>Inconsistency</i> 0,00908)	Pasca-Krisis Covid-19 (<i>Inconsistency</i> 0,00471)
1.	Pengelolaan Oleh Masyarakat	0,174	0,146
2.	Pengelolaan Oleh Pemerintah	0,113	0,148
3.	Pengelolaan Oleh Swasta	0,100	0,151
4.	Pengelolaan Kolaboratif	0,613*	0,554*
Jumlah		1,000	1,000

Keterangan: * = kriteria tertinggi dan menjadi prioritas
Sumber: data primer diolah, 2020

Tabel 5. Pengelola Wisata Pantai Halassy Pada Pra dan Pasca-Krisis Covid-19

No.	Alternatif Pengelola	Nilai	
		Pra-Krisis Covid-19 (<i>Inconsistency</i> 0,01)	Pasca-Krisis Covid-19 (<i>Inconsistency</i> 0,00)
1.	Pengelolaan Oleh Masyarakat	0,172	0,148
2.	Pengelolaan Oleh Pemerintah	0,124	0,137
3.	Pengelolaan Oleh Swasta	0,121	0,131
4.	Pengelolaan Kolaboratif	0,583*	0,584*
Jumlah		1,000	1,000

Keterangan: * = kriteria tertinggi dan menjadi prioritas
Sumber: data primer diolah, 2020

Hasil analisis pada Tabel 2 hingga Tabel 4 yang melibatkan 4 alternatif pengelola

pada masing-masing kriteria (parsial) mengarahkan alternatif pengelola wisata

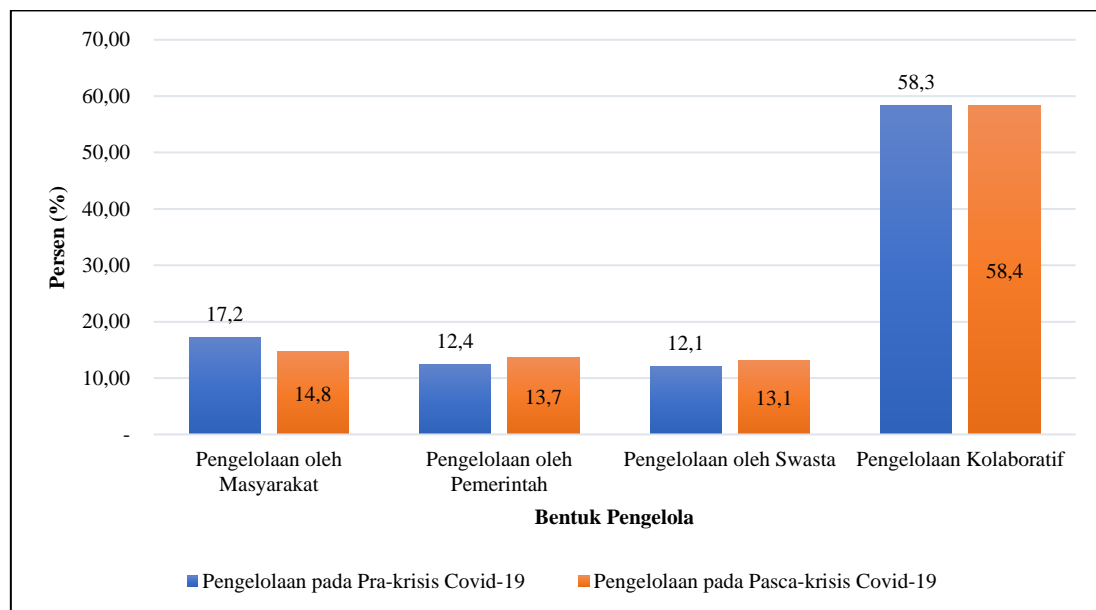


Pantai Halassy pada bentuk pengelolaan kolaboratif. Hasil analisis yang melibatkan gabungan 3 kriteria pada 4 alternatif (simultan) terlihat pada Tabel 5.

Nilai dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa bentuk pengelola kolaboratif merupakan alternatif yang diprioritaskan atau prioritas pertama baik pada fase pra ataupun pasca-krisis covid-19 dalam manfaat ekonomi pada usaha wisata Pantai Halassy. Untuk mengelola manfaat ekonomi pada fase pra-krisis covid-19, prioritas kedua adalah pengelolaan oleh masyarakat (nilai = 0,174), prioritas ketiga adalah pengelolaan oleh pemerintah (nilai = 0,113), dan prioritas terakhir atau keempat adalah pengelolaan oleh swasta (nilai = 0,100). Sedangkan untuk kelestarian lingkungan pada fase pasca-krisis covid-19, prioritas kedua adalah pengelolaan oleh swasta (nilai = 0,151), prioritas ketiga adalah pengelolaan oleh pemerintah (nilai = 0,148), dan prioritas terakhir atau keempat adalah pengelolaan oleh masyarakat (nilai = 0,146).

Pada fase pra-krisis covid-19 untuk pengelola, prioritas kedua adalah pengelolaan oleh masyarakat (nilai = 0,172), prioritas ketiga adalah pengelolaan oleh pemerintah (nilai = 0,124), dan prioritas terakhir atau keempat adalah pengelolaan oleh swasta (nilai = 0,121). Sedangkan untuk pengelola pada fase pasca-krisis covid-19, prioritas kedua adalah pengelolaan oleh masyarakat (nilai = 0,148), prioritas ketiga adalah pengelolaan oleh pemerintah (nilai = 0,137), dan prioritas terakhir atau keempat adalah pengelolaan oleh swasta (nilai = 0,131).

Tabel 5 juga menunjukkan bahwa nilai tertinggi pada fase pra-krisis covid-19 adalah alternatif pengelolaan kolaboratif sebesar 0,583 dengan nilai *inconsistency* yaitu 0,01, dan nilai tertinggi pada fase pasca-krisis covid-19 adalah alternatif pengelolaan kolaboratif sebesar 0,584 dengan nilai *inconsistency* yaitu 0,00. Selain pada Tabel 5, terlihat dengan jelas juga pada Gambar 3, bahwa persentase tertinggi adalah pengelolaan secara kolaboratif.

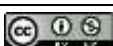


Gambar 3. Persentase Nilai Prioritas Pengelola Wisata Pantai Halassy

Sumber: data primer diolah, 2020.

Nilai atau persentase ini mengartikan bahwa bentuk pengelola kolaboratif merupakan alternatif yang diprioritaskan baik pada fase pra ataupun pasca-krisis covid-19 dalam mengelola wisata Pantai Halassy, atau alternatif pengelola wisata Pantai Halassy baik

pada fase pra dan pasca-krisis covid-19 adalah pengelolaan kolaboratif atau diperlukan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan swasta. Dengan adanya kolaborasi maka biaya pengelolaan, kelestarian lingkungan dan manfaat ekonomi wisata Pantai Halassy



dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengapa kolaborasi dianggap sangat penting? Hasil beberapa studi literatur menunjukkan bahwa motivasi yang muncul pada kelompok pemangku kepentingan adalah kolaborasi, akan menghasilkan capaian yang positif, capaian solusi untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan bisa dilakukan dengan cara yang *fair*, setiap pemangku kepentingan mempunyai kapasitas untuk berpartisipasi secara detail dalam pengelolaan (Gray, 1989 dalam Imron dan Anwar, 2019). Kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dikenal dengan konsep *triple helix*. Menurut Resdiana dan Sari (2019), pada dasarnya konsep *triple helix* ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk saling memberikan dukungan serta perannya dalam pengembangan wisata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa: untuk pada fase pra pemerintah dapat membangun kualitas daerah wisata yang berwawasan lingkungan dan budaya, masyarakat sebagai pengelola mampu meningkatkan akses informasi bagi wisatawan, begitupun swasta memberikan kontribusi manfaat ekonomi dan sosial untuk kapasitas pengelolaan. Pada fase pasca pemerintah mampu melihat potensi wisata yang ada agar dapat dikembangkan, masyarakat dapat menerapkan konsep 4A dan swasta lebih menciptakan ide-ide menarik untuk mendatangkan wisatawan. Alternatif pengelola wisata Pantai Halassy yang tepat pada fase pra dan pasca-krisis covid-19 adalah kolaboratif atau kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan swasta. Kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dikenal dengan konsep *triple helix*.

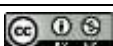
Saran

Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah, swasta dan masyarakat perlu bekerja sama (berkolaborasi) sesuai dengan peran masing-masing dalam mengelola wisata

Pantai Halassy baik pada fase pra-krisis covid-19 maupun nanti pada pasca-krisis covid-19. Penelitian lanjutan tentang evaluasi manajemen wisata Pantai Halassy pada perlu dilakukan guna menjawab berapa efektifitasnya usaha berbentuk perseorangan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, D. Y. 2019. Kajian Pengembangan Obyek Wisata Bahari Pantai Hunimua Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-12.
- Beritabeta. 2020. Imbas Corona di Maluku, 205 Karyawan di-PHK dan 1.793 Dirumahkan. <https://beritabeta.com/news/ekonomi/205-karyawan-di-phk-dan-1-793-dirumahkan/>
- Engkus, Suparman N., Sakti, F. T., & Anwar, H. S. 2020. Covid-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran Dan Dampak Sosial Ekonomi di Indonesia. *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*, <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30820>.
- Falatehan, A. F. 2016. *Analytical Hierarchy Process (AHP) Teknik Pengambilan Keputusan Untuk Pembangunan Daerah*. Yogyakarta, Indomedia Pustaka.
- Imron, M. dan Anwar, M. S. 2019. Strategi Kolaborasi Pengembangan Wisata Berbasis Edukasi di *Clungup Mangrove Conservation* Desa Tambakrejo Kabupaten Malang. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 78-90.
- Kurniati, D. 2020. Efek Virus Corona Sri Mulyani Sebut Skenario Terburuk Ekonomi RI Bisa Minus 0,4%. <https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-sebut-skenario-terburuk-ekonomi-ri-bisa-minus-04--19942>. Diakses 22 Februari 2021.
- Resdiana, E. dan Sari, T. T. 2019. *Penguatan Triple Helix Pada Sektor Pariwisata*. Penerbit Universitas Wiraraja Sumenep, ISBN: 978-602-50605-9-5, Madura.



- Muryani. 2013. Penerapan Proses Hirarki Analitik dan Valuasi Ekonomi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi kasus: Taman Nasional Ujung Kulon, Banten). *Jurnal ekonomi dan Bisnis*, XXIII (1), 086-095.
- Solemede, I., Tamaneha, T., Selfanay, R., Solemede, M., Walunaman, K., 2020. Strategi Pemulihan Potensi PariwisataBudaya di Provinsi Maluku (SuatuKajian Anaisis di Masa Transisi kenormalan Baru). *Noumena: Jurnal Ilmu Sosial* 1(1) pp 69-86.
- Sugiyono. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- Sugihamretha, I. D. G. 2020. Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *The Indonesian Journal of Developmment Planning*, IV (2), 191-206.
- Tribunnews. 2020. Seluruh Destinasi Wisata di Maluku Ditutup Sementara, Wisatawan Asing Dipulangkan. <https://www.tribunnews.com/corona/2020/03/23/seluruh-destinasi-wisata-di-maluku-ditutup-sementara-wisatawan-asing-dipulangkan>. Diakses 23 Maret 2020.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatawa. Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

